



KEPUTUSAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERANGAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1992

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian, untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Perhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;
2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

etapkan :
tama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

a : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

ga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

bat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen.

Kelima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri | 7.830 buah; |
| b. SMA Negeri | 2.141 buah; |
| c. SMIP Negeri | 1 buah; |
| d. SMIK Negeri | 13 buah; |
| e. SMPs Negeri | 14 buah; |
| f. SMEA Negeri | 336 buah; |
| g. SMT Pertanian Negeri | 31 buah. |

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

tujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspekturat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
Kepala Administrasi Kepegawaian Negara;
Kepala Pemeriksa Keuangan;
Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
dan yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

dan sesuai dengan aslinya
Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Bagian Penyusunan Rancangan
dan Perundang-undangan

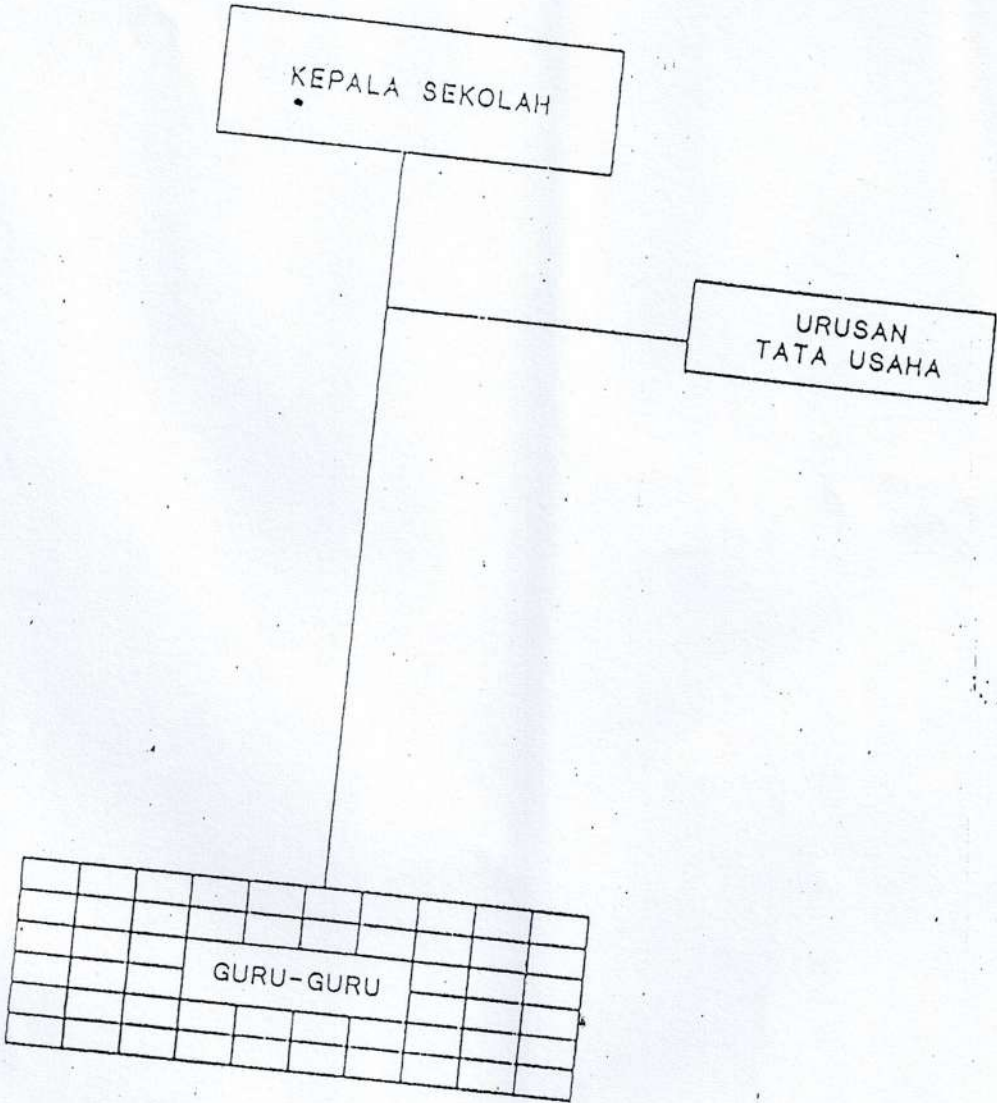
Salinan Sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop.
Jawa Tengah
Bagian Perencanaan
SOEHARMONO, MBA.
130 188 870.



0344753

Nomor 0216/O/1992, tanggal 5 Mei 1992

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



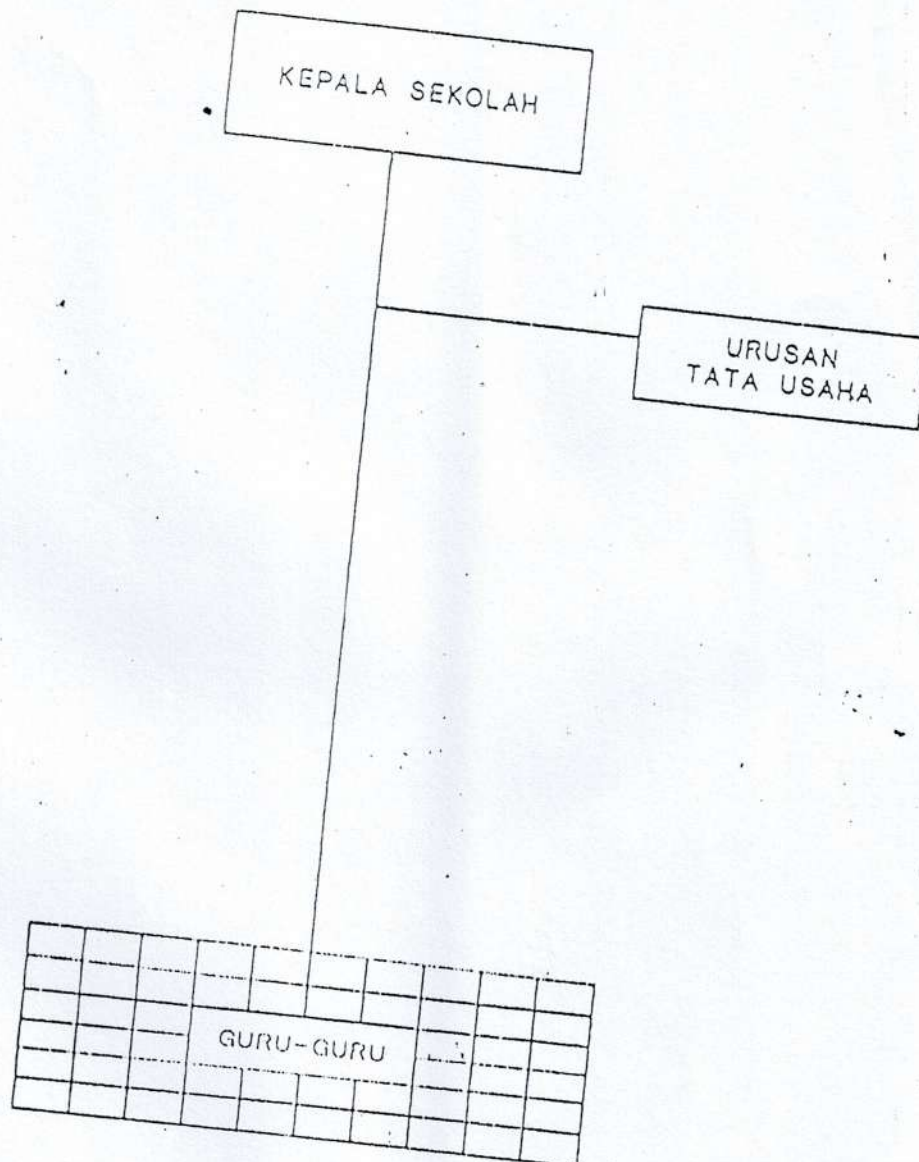
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



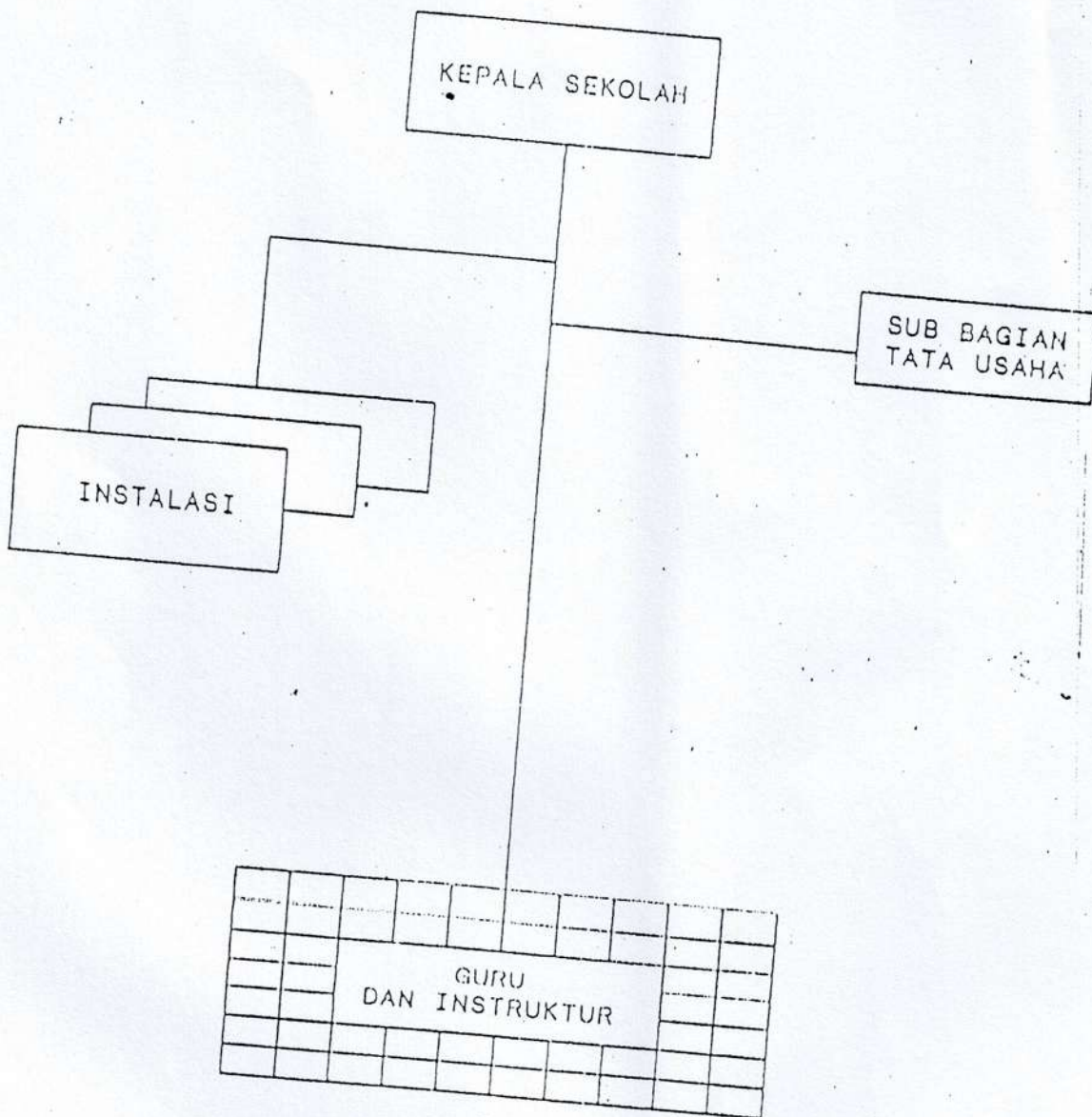
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tld.

Fuad Hassan

1. SMP Negeri 2 Purwonegoro	Purwonegoro	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5110
2. SMP Negeri 3 Bawang	Bawang	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5120
3. SMP Negeri 2 Kalibening	Kalibening	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5150
4. SMP Negeri 2 Punggelan	Punggelan	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5210
5. SMP Negeri 2 Rakit	Rakit	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5220
6. SMP Negeri 6 Banjarnegara	Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5230
7. SMP Negeri 2 Patikraja	Patikraja	Kabupaten Banyumas	09.1.2.1038.23.01.04.5250
8. SMP Negeri 2 Sumbang	Sumbang	Kabupaten Banyumas	
9. SMP Negeri 2 Pekuncen	Pekuncen	Kabupaten Banyumas	
10. SMP Negeri 3 Limpung	Limpung	Kabupaten Batang	
11. SMP Negeri 2 Tersono	Tersono	Kabupaten Batang	
12. SMP Negeri 2 Bandar	Bandar	Kabupaten Batang	

		6		7	
		Ulujami	Kabupaten Pemalang		
74. SMP Negeri 6 Pemalang	-	Pemalang	Kabupaten Pemalang		
75. SMP Negeri 2 Bodeh	-	Bodeh	Kabupaten Pemalang		
76. SMP Negeri 3 Petarukan	-	Petarukan	Kabupaten Pemalang		
77. SMP Negeri 2 Moga	-	Moga	Kabupaten Pemalang		
78. SMP Negeri 2 Ampelgading	-	Ampelgading	Kabupaten Pemalang		
79. SMP Negeri 2 Bantarbolang	-	Bantarbolang	Kabupaten Pemalang		
80. SMP Negeri 2 Ngombol	-	Ngombol	Kabupaten Purwoirejo		
81. SMP Negeri 2 Jakenan	-	Jakenan	Kabupaten Pati ✓		
82. SMP Negeri 2 Wedarijaksa	-	Wedarijaksa	Kabupaten Pati ✓		
83. SMP Negeri 2 Sukolilo	-	Sukolilo	Kabupaten Pati ✓		
84. SMP Negeri 2 Tambakromo	-	Tambakromo	Kabupaten Pati ✓		

	5	6	7
86. SMP Negeri 2 Sarang	Sulang	Kabupaten Rembang ✓	
87. SMP Negeri 2 Sumber	Sarang	Kabupaten Rembang ✓	
88. SMP Negeri 2 Kragan	Sumber	Kabupaten Rembang ✓	
89. SMP Negeri 2 Pamotan	Kragan	Kabupaten Rembang ✓	
90. SMP Negeri 2 Mojolaban	Pamotan	Kabupaten Rembang ✓	
91. SMP Negeri 2 Bulu	Mojolaban	Kabupaten Sukoharjo	
92. SMP Negeri 2 Nguter	Bulu	Kabupaten Sukoharjo	
93. SMP Negeri 33 Semarang	Nguter	Kabupaten Sukoharjo	
94. SMP Negeri 34 Semarang	Semarang Selatan	Kodya Semarang	
95. SMP Negeri 35 Semarang	Genuk	Kodya Semarang	
96. SMP Negeri 4 Ambarawa	Gunungpati	Kodya Semarang	
	Ambarawa	Kabupaten Semarang	

2	3	4	5	6	7
PENEGERIAN	9. SMEA Negeri 1 Viqueque	SMEA Swasta Viqueque	Viqueque	Kabupaten Covalima	09-1-6-1102-23-01-27-5110
	10. SMEA Negeri 1 Same	SMEA Swasta Same	Same	Kabupaten Manufahi	09-1-6-1102-23-01-27-5120
					09-1-6-1102-23-01-27-5150
					09-1-6-1102-23-01-27-5210
					09-1-6-1102-23-01-27-5220
					09-1-6-1102-23-01-27-5230
					09-1-6-1102-23-01-27-5250
					09-1-6-1102-23-01-27-5350

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiya
NIP 130344753

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan